

## Strategi Kampanye Militer Terpadu: Analisis SWOT Terhadap Peran Komando Operasi TNI di Papua

Ilham Panji Akbar<sup>1</sup> Agus Winarna<sup>2</sup> Ruslan Arief<sup>3</sup>

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [panjiilham258@gmail.com](mailto:panjiilham258@gmail.com)<sup>1</sup> [aguswin@idu.ac.id](mailto:aguswin@idu.ac.id)<sup>2</sup> [ruslanarief01@gmail.com](mailto:ruslanarief01@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tesis ini menganalisis secara mendalam peran strategis Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia (Koops TNI) Papua dalam melaksanakan konsep operasi terpadu guna mendukung tugas pokok TNI di wilayah perbatasan darat Papua-PNG. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal terjal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 11 informan kunci lintas sektor (operasi, intelijen, logistik, Pemda, dan tokoh adat), observasi lapangan di Jayawijaya dan Nduga, serta studi dokumentasi kebijakan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Koops TNI Papua, khususnya melalui sub-komando terpadu Koops Habema, telah menggeser paradigma operasi dari militeristik murni menuju integrasi fungsi pertahanan darat dan Pembinaan Teritorial yang humanis berbasis smart power. Analisis SWOT kuantitatif menghasilkan skor IFAS sebesar 2,984 dan EFAS sebesar 2,629, menempatkan organisasi di Kuadran I (Agresif) pada koordinat (+1,330; +1,039). Hal ini merekomendasikan implementasi Strategi Strengths-Opportunities (SO) secara ofensif. Hambatan operasional utama yang diidentifikasi meliputi kendala medan geografis ekstrem, fenomena blank spot komunikasi, keterbatasan armada transportasi helikopter, serta ancaman taktik gerilya asimetris KKB/OPM. Strategi optimalisasi dirumuskan melalui penguasaan informasi udara berbasis drone surveillance, pembentukan pusat koordinasi terpadu TNI-Polri-Pemda secara real-time, serta akselerasi pembangunan jalan inspeksi perbatasan terintegrasi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal adat Papua

**Kata Kunci:** Koops TNI Papua, Konsep Operasi, Smart Power, KKB, OMSP, Strategi Pertahanan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Koops TNI merupakan bagian integral dari struktur organisasi TNI, yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara (UU RI Nomor 34 Tahun 2004), termasuk OMP dan OMSP di seluruh wilayah, salah satunya adalah Koops TNI Papua yang sangat strategis dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang kompleks (Ungusari, 2015). Upaya penegakan kedaulatan NKRI oleh Koops TNI Papua menghadapi berbagai tantangan multi-dimensi, salah satunya topografis ekstrem (hambatan permanen aksesibilitas darat), kerentanan moda transportasi udara atas jendela cuaca (*flight window*), karakteristik sosial-budaya Papua (Pauker, 1963). Lebih lanjut, kesejangan kesejahteraan (Indeks Pembangunan Manusia di bawah rata-rata nasional), dan eskalasi serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata/Kelompok Separatis Teroris (KKB/KST) sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kawasan Papua merepresentasikan salah satu lingkungan operasional pertahanan darat yang paling kompleks dan menantang di Indonesia. Keterisolasian geografis berupa hutan belantara tropis and pegunungan terjal tidak hanya mempersulit mobilitas militer dan jalur logistik, tetapi juga menciptakan titik buta pengawasan (*blank spot*) yang rentan dieksploitasi oleh aktor ancaman asimetris. Di sisi lain, isu sosial-ekonomi seperti kesenjangan pembangunan dan trauma historis masa lalu memicu terjadinya dinamika ketegangan sosial

yang berlarut-larut. Kondisi ini menyuburkan gerakan separatisme yang dimotori oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang memanfaatkan taktik perang gerilya asimetris dan infiltrasi senjata ilegal lintas batas negara Papua Nugini (PNG).

Untuk menghadapi ancaman hibrida multidimensional tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah merumuskan transformasi arsitektur komando melalui pembentukan Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia (Koops TNI) Papua, yang salah satu sub-komando terpadunya adalah Komando Operasi Terpadu Habema (Koops Habema) yang dibentuk pada tahun 2024. Pembentukan komando terpadu ini ditujukan untuk mengintegrasikan pola operasi lintas matra (TNI AD, AL, AU) dan Polri dalam satu operasi gabungan (*joint operation*) yang terpusat dan responsif, guna mengatasi fragmentasi operasional dan mempercepat respons terhadap berbagai ancaman keamanan yang bersifat asimetris di wilayah ujung timur Indonesia, sekaligus menggeser pendekatan militeristik murni menuju pola holistik-humanis berbasis *smart power* (Wiratama & Hendra, 2024).

Secara ideal, Koops TNI seharusnya mampu menerapkan strategi *smart power* dengan mengintegrasikan kekuatan militer (*hard power*) untuk penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan pendekatan humanis (*soft power*) berbasis kesejahteraan (Wiratama & Hendra, 2024). Konsep ideal tersebut diwujudkan menjadi *Unified Action* (pasca-pembentukan Koops Habema 2024) (Mawangi, 2024), yang merupakan integrasi gabungan pola operasi TNI dan Polri dengan pusat komando terpadu, ramping, dan responsif atas dinamika keamanan di daerah rawan, seperti Jayawijaya dan Nduga (Mawangi, 2024). Kebijakan ini mengedepankan sinergi erat antara operasi pertahanan fisik keamanan dengan program Pembinaan Teritorial (Binter) kemasyarakatan guna memenangkan hati dan pikiran rakyat (*hearts and minds*) sekaligus meredam disintegrasi bangsa. Strategi yang mengedepankan "*hearts and minds*" ini berfokus pada upaya penghargaan dan penghormatan atas struktur adat, melibatkan aktif tokoh lokal dalam perencanaan program pembangunan wilayah, sehingga selaras doktrin kontra-insurgensi modern (keberhasilan jangka panjang tidak hanya dicapai melalui superioritas militer, namun rekonstruksi kepercayaan masyarakat atas kehadiran negara) (Galula, 1964; Petraeus & Amos, 2006).

Eskalasi konflik bersenjata di Papua (2024-2025) menunjukkan sedikitnya 85 kasus kekerasan yang menyebabkan 114 orang menjadi korban, dengan 71 orang di antaranya meninggal dunia (Asra, 2024). Kendala operasional nyata, menunjukkan bahwa mobilitas pasukan bergantung ketersediaannya armada helikopter yang terbatas, pola serangan KKB semakin sistematis, yang juga menargetkan fasilitas publik, tenaga profesional, maupun terhadap warga sipil (Kompas.id, 2024). Selain itu, adanya wilayah *blank spot* komunikasi yang luas mengakibatkan koordinasi komando dan kendali secara *real-time* sering kali terputus, sehingga menciptakan celah keamanan yang dieksploitasi oleh kelompok insurgensi. Lebih lanjut, hanya sekitar 30% wilayah Papua yang terhubung melalui jaringan jalan darat, sehingga mengakibatkan biaya operasional menjadi sangat tinggi dan keberlanjutan program kesejahteraan sering terputus akibat kendala distribusi logistik yang tidak menentu (Ungusari, 2015).

Secara sosial, niat kebijakan *smart power* yang mengedepankan aspek humanis masih sering berhadapan dengan residu trauma historis masyarakat serta masifnya narasi disinformasi dalam *information warfare* yang sengaja dieksploitasi oleh kelompok separatist untuk merusak kepercayaan publik terhadap TNI, sehingga upaya pembangunan teritorial oleh TNI dianggap memicu resistensi masyarakat (Tippe, 2026). Kegagalan pembangunan dengan melibatkan komunitas lokal, mengindikasikan bahwa tanpa komunikasi sosial yang konsisten, upaya memenangkan "*hearts and minds*" akan tetap mengalami jalan buntu (Wangge & Webb-

Gannon, 2020). Meskipun konsep operasi ini telah dicanangkan secara progresif, implementasinya di lapangan menghadapi celah lebar antara perencanaan strategis (*intended strategy*) dan realitas taktis (*gap analysis*). Hambatan geografis ekstrem, ketergantungan operasional yang tinggi pada armada angkut udara helikopter, serta belum sinergisnya koordinasi lintas sektor sipil-militer menjadi persoalan kritis yang memerlukan evaluasi ilmiah terukur.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Nduga menjadi interpretasi wilayah Papua, didasarkan kedua wilayah tersebut merupakan pusat gravitasi operasional (*center of gravity*) dari pembentukan Komando Operasi Habema pada tahun 2024 (Mawangi, 2024). Wilayah Pegunungan Tengah Papua merepresentasikan karakteristik hambatan paling ekstrem (elevasi medan tinggi dan tutupan hutan lebat). Wilayah Jayawijaya dan Nduga (daerah dengan dinamika konflik asimetris yang intens, lokasi yang paling otoritatif untuk menganalisis efektivitas peran komando dalam mengintegrasikan penindakan terhadap KKB dengan pendekatan *smart power* berbasis kesejahteraan masyarakat lokal). Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini adalah belum tersedia kajian komprehensif, secara holistik, yang mengevaluasi efektivitas pusat komando terpadu tersebut dalam mengimplementasikan konsep operasi serta strategi *smart power* secara nyata. Penelitian terdahulu seperti Tippe (2026) menganalisis relasi sipil-militer sosiologis, sementara Wangge dan Webb-Gannon (2020) meneliti kegagalan COIN taktis di Nduga, namun belum ada kajian terintegrasi yang secara khusus menguji efektivitas komando operasi terpadu Habema pasca 2024 menggunakan pemetaan matriks SWOT kuantitatif. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi peran Koops TNI Papua guna memperkuat kedaulatan NKRI secara berkelanjutan.

## Penelitian Terdahulu yang Relevan

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis/<br>Tahun                   | Judul                                                                                                 | Tujuan                                                               | Metode                                                                       | Hasil                                                                                                                                                                                   | Kontribusi dan<br>relevansi                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Syafrudin<br>Tippe/<br>2006         | Relasi Sipil-Militer dalam Pemberdayaan Masyarakat Papua                                              | Analisis hubungan Sipil-Militer dan pemberdayaan masyarakat di Papua | Kualitatif. Studi Kasus                                                      | Hubungan sipil-militer dan pemberdayaan masyarakat Papua menyoroti bahwa pendekatan historis pemerintah yang mengabaikan keterlibatan masyarakat lokal menciptakan ketegangan.          | Kasus terkait pendekatan historis pemerintah kepada masyarakat lokal menciptakan ketegangan, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif. |
| 2  | Wangge dan Webb-Gannon/<br>2020     | Civilian resistance and the failure of the Indonesian counterinsurgency campaign in nduga, west papua | Kampanye kontra-insurgensi TNI di Nduga dan resistensi sipil.        | Pemeriksaan mendalam kampanye COIN, analisis interaksi TNI-masyarakat sipil. | Kegagalan kampanye kontra-insurgensi TNI di Nduga mengidentifikasi kebutuhan strategi COIN yang lebih efektif dan etis, yang memprioritaskan perlindungan sipil dan keterlibatan tulus. | Kebutuhan strategi COIN yang lebih efektif dan etis, yang memprioritaskan perlindungan sipil dan keterlibatan tulus                               |
| 3  | Jurnal Hubungan Internasional, 2022 | Insurgency, Counterinsurgency and Human Security: A Case Study of Armed                               | Dinamika insurgensi, kontra-insurgensi, dan dampaknya pada keamanan  | Kualitatif deskriptif, pemrosesan data sekunder                              | insurgensi, kontra-insurgensi, dan keamanan manusia di Papua selama pandemi COVID-19 menyoroti kurangnya upaya dialog                                                                   | Kurangnya upaya dialog antara pemerintah dan TPNPB; efektivitas kebijakan saat ini dipertanyakan;                                                 |

|  |  |                                                 |                                           |  |                                                                                      |                                                                                                |
|--|--|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Violence in Papua during the COVID- 19 Pandemic | manusia di Papua selama pandemi COVID-19. |  | antara pemerintah dan TPNPB serta efektivitas kebijakan saat ini yang dipertanyakan. | dampak negatif pelabelan "teroris";perlunya hubungan kekuasaan yang seimbang dalam kolaborasi. |
|--|--|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif untuk membedah peran operasional dan strategi komando pertahanan terpadu di Papua, serta mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena peran komando strategis di wilayah konflik. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang induktif, di mana peneliti berupaya menangkap makna di balik data serta memahami interaksi kompleks antara tindakan militer dengan dimensi sosial-politik di Papua yang dinamis. Melalui metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data yang kaya konteks (*thick description*) guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas operasional dan strategi optimalisasi ke depan. Desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus tunggal terjal (*embedded single case study design*) yang merujuk pada kerangka metodologis Robert K. Yin. Desain ini sangat relevan karena menempatkan Koops TNI Papua sebagai satu kasus tunggal yang kompleks, dengan tiga unit analisis terintegrasi: (1) pelaksanaan konsep operasi dan pendekatan *smart power*, (2) faktor-faktor hambatan operasional, dan (3) strategi optimalisasi komando terpadu di masa depan. Desain ini menjamin penyelaman data secara granular sehingga mampu mengungkap mekanisme rumit di balik transformasi arsitektur keamanan pasca pembentukan Koops Habema.

Secara operasional, prosedur penelitian dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis sebagai berikut: diawali dengan studi pendahuluan untuk menemukan data awal gangguan keamanan, dilanjutkan dengan merumuskan masalah dan menyusun kerangka teori yang relevan. Selanjutnya, peneliti menentukan informan kunci melalui *purposive sampling*, menyusun pedoman wawancara, serta mengumpulkan data primer dan sekunder di lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui proses kategorisasi dan *coding*, diperiksa keabsahannya melalui teknik triangulasi, hingga akhirnya dianalisis secara tematik untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci guna menangkap fenomena peran komando secara utuh dan kontekstual. Mengingat penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data difokuskan pada upaya mendapatkan data primer yang mendalam serta data sekunder yang otoritatif guna menjamin validitas temuan penelitian. Pengumpulan data primer dilaksanakan pada periode Januari 2026 melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur dengan lima informan kunci strategis yang dipilih secara *purposive sampling*.

Pengolahan data kualitatif menggunakan teknik transkripsi verbatim, kategorisasi tematik, pengkodean (*open coding* dan *in vivo coding*), serta reduksi data. Pemeriksaan keabsahan data (*trustworthiness*) menerapkan uji kredibilitas (triangulasi sumber, metode, teori, dan member checking), transferabilitas melalui deskripsi tebal (*thick description*), dependabilitas melalui audit trail, dan konfirmabilitas melalui *peer debriefing* dengan Dewan Pembimbing (Lincoln & Guba, 1985). Analisis data akhir dilakukan secara hibrida menggunakan Analisis Tematik Braun & Clarke (2006) dan pemetaan Matriks SWOT (IFAS dan EFAS) guna menghasilkan koordinat kartesius yang presisi bagi perumusan bauran strategi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Wilayah Operasi Papua

#### Karakteristik Geografis dan Topografis

Secara administratif, Papua terbagi menjadi enam provinsi hasil pemekaran Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya dengan total luas mencapai sekitar 421.981 km<sup>2</sup>, menjadikan Papua sebagai kawasan pulau terluas di Indonesia dan terluas kedua di antara pulau-pulau di dunia setelah *Greenland*. Secara geomorfologi, Papua didominasi oleh Pegunungan Tengah (*Central Range*), dengan puncak tertinggi, yakni Puncak Jaya (*Carstensz Pyramid*) ketinggian 4.884mdpl, dan merupakan satu-satunya pegunungan tropis dengan gletser permanen. Karakteristik topografis ini menciptakan 3 (tiga) tantangan operasional yang bersifat permanen dan fundamental, yakni: 1) ketiadaan aksesibilitas darat yang memadai, dan mobilitas manusia maupun distribusi logistik sepenuhnya bergantung pada transportasi udara; 2) variabilitas cuaca yang ekstrem, seperti kabut tebal, hujan orografis intensitas tinggi, dan angin kencang, yang menjadikan jendela cuaca layak terbang berlangsung 2–3 jam perhari; 3) hutan hujan tropis lebat yang menutupi sebagian besar kawasan dataran rendah dan lereng pegunungan, sehingga menghambat pengamatan dan pergerakan pasukan. Kabupaten Nduga, menjadi salah satu episentrum aktivitas KKB, dengan luas wilayah 11.441 km<sup>2</sup> (elevasi rata-rata diatas 2.000 mdpl). Seluruh 32 distrik di Kabupaten Nduga tidak dapat dijangkau melalui jalan darat sehingga penerbangan perintis dan helikopter menjadi satu-satunya moda transportasi. Kondisi serupa berlaku di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Kondisi inilah yang menjadikan wilayah-wilayah tersebut sebagai *sanctuaries* yang efektif bagi KKB untuk bergerak, bersembunyi, dan menghindari tekanan operasional dari aparat keamanan.

#### Karakteristik Sosial-Budaya

Papua merupakan salah satu wilayah dengan keragaman etnolinguistik tertinggi di dunia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud mencatat keberadaan lebih dari 428 bahasa daerah di seluruh Papua. Keragaman linguistik ini mencerminkan pluralisme budaya yang sangat dalam. Lebih dari 250 suku diakui secara adat, dengan sistem kepercayaan, struktur kekerabatan, hukum adat, dan hubungan dengan tanah ulayat yang berbeda-beda. Sistem kepemimpinan adat di Papua umumnya bersifat egaliter, dimana *bigmen* pemimpin dibangun berdasarkan kemampuan redistribusi sumber daya, keberanian, dan kemampuan mediasi konflik, bukan atas dasar genealogi, sehingga pendekatan tanpa mempertimbangkan hirarki adat dan protokol lokal berisiko menciptakan resistensi masyarakat atas TNI. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Papua dan Papua Pegunungan berada di kisaran 60–63, jauh di bawah rata-rata nasional 74,39 (BPS, 2023). Tingkat kemiskinan di kabupaten-kabupaten terdampak konflik seperti Nduga, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang mencapai di atas 30%, sementara angka buta huruf dan putus sekolah juga jauh di atas rata-rata nasional. Kesenjangan dan persisten ini menjadi salah satu faktor struktural yang memelihara ketidakpuasan dan menyediakan basis rekrutmen potensial bagi kelompok-kelompok yang menentang negara.

#### Dinamika Politik dan Keamanan

Secara historis, integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 telah lama menjadi sumber kontroversi domestik dan internasional. Jaringan diaspora Papua di berbagai negara secara aktif menggalang dukungan internasional dan memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan narasi yang mempertanyakan legitimasi kehadiran Indonesia di Papua. Pada tingkat domestik, Kelompok

Kriminal Bersenjata (KKB) secara konsisten melaksanakan aksi-aksi kekerasan bersenjata yang menargetkan aparat keamanan, pekerja infrastruktur, guru, dan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Pola serangan KKB bersifat *hit-and-run* dengan memanfaatkan pengetahuan medan yang superior, jaringan simpatisan lokal, dan kemampuan berpindah lintas distrik secara cepat. Penggunaan senjata api standar militer yang diperoleh dari berbagai sumber menjadikan KKB ancaman yang tidak dapat diremehkan meskipun dari segi kekuatan numerik relatif kecil. Kompleksitas keamanan Papua semakin diperparah oleh fenomena *information warfare* yang semakin canggih, terkait dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, disebarkan secara masif melalui platform media sosial, seringkali dengan manipulasi konteks, waktu, dan lokasi kejadian. Kondisi ini menempatkan Koops TNI Papua dalam dilema operasional yang khas: tindakan yang secara militer efektif dapat mengundang kritik internasional yang melemahkan legitimasi operasi, sementara pengendalian diri yang berlebihan dapat mendorong eskalasi KKB. Pendekatan *smart power* yang mengintegrasikan kemampuan militer dengan pendekatan humanis, pembangunan, dan diplomasi masyarakat menjadi respons strategis yang paling rasional dalam menghadapi dilema ini (Nye, 2011).

## **Koops TNI Papua**

### **Sejarah Pembentukan dan Kedudukan Kelembagaan**

Komando Operasi TNI Papua (Koops TNI Papua) merupakan komando operasi strategis yang dibentuk dalam kerangka restrukturisasi pertahanan Indonesia di wilayah timur yang mengalami eskalasi konflik sejak pertengahan dekade 2010-an. Secara kelembagaan, Koops TNI Papua berkedudukan di bawah Panglima TNI dan berfungsi sebagai komando pelaksana yang mengintegrasikan seluruh komponen kekuatan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam satu kerangka operasi gabungan (*joint operation*) di wilayah Papua. Pembentukan Koops TNI Papua merespons kebutuhan akan komando operasional yang lebih terpusat, responsif, dan memiliki kewenangan lintas matra yang jelas dalam menghadapi dinamika keamanan Papua yang semakin kompleks. Sebelumnya, penanganan keamanan Papua terfragmentasi di antara Kodam XVII/Cenderawasih, Lantamal X, dan Lanud Silas Papare yang masing-masing memiliki rantai komando terpisah. Fragmentasi ini dinilai mengurangi kecepatan respons dan efektivitas koordinasi operasional dalam menghadapi ancaman yang bersifat asimetris dan bergerak cepat. Kewenangan komando dan kendali (*command and control / C2*) Koops TNI Papua mencakup: penetapan prioritas operasi; alokasi dan redistribusi sumber daya antarunsur; penetapan aturan pelibatan (*rules of engagement*); serta koordinasi dengan instansi non-TNI termasuk Polri, Pemerintah Daerah, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kewenangan yang luas ini menempatkan Koops TNI Papua sebagai komando operasional terpenting dalam penanganan situasi keamanan Papua secara komprehensif dan terpadu.

### **Pembentukan Koops Habema: Sub-Komando Operasional Baru**

Perkembangan paling signifikan dalam arsitektur komando operasional TNI di Papua adalah pembentukan Komando Operasi Habema (Koops Habema) pada tahun 2024. Koops Habema dibentuk melalui Keputusan Panglima TNI sebagai komando operasi baru di bawah Koops TNI Papua yang secara khusus dirancang untuk menangani operasi di wilayah pegunungan tengah Papua mencakup Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan sekitarnya. Penamaan "Habema" merujuk pada Danau Habema (*Habema Lake*), sebuah danau vulkanik yang terletak di ketinggian 3.225 mdpl di kawasan Taman Nasional Lorentz, Kabupaten Jayawijaya salah satu danau tertinggi di Indonesia dan satu-satunya taman nasional yang membentang dari puncak salju abadi hingga zona pasang surut laut. Pemilihan nama ini mencerminkan dengan tepat karakter operasional yang menjadi

mandat Koops Habema: kemampuan beroperasi di lingkungan pegunungan dengan ketinggian ekstrem yang menuntut spesialisasi taktis, kesiapan fisik prima, dan ketangguhan mental yang tidak tergoyahkan.

Secara konseptual, Koops Habema dirancang untuk mengatasi kelemahan fundamental dari pendekatan sebelumnya yang mengandalkan satuan-satuan bermarkas di dataran rendah dan harus melakukan pergerakan ke atas untuk merespons ancaman. Dengan menempatkan komando dan elemen-elemen tempur inti lebih dekat ke zona konflik, Koops Habema diharapkan mampu mempersingkat waktu respons, meningkatkan kualitas intelijen lokal, dan memperkuat kehadiran negara secara permanen di wilayah yang selama ini menjadi *ungoverned space* yang dieksploitasi oleh KKB. Secara doktrin, Koops Habema menerapkan konsep *unified action* yang mengintegrasikan operasi kinetik (penindakan KKB) dengan operasi non-kinetik (pembangunan kepercayaan masyarakat, bantuan kemanusiaan, dan penguatan pemerintahan lokal) dalam satu kerangka yang sinergis. Pendekatan ini mencerminkan pembelajaran dari berbagai konflik asimetris global bahwa keberhasilan jangka panjang tidak dapat dicapai semata-mata melalui superioritas militer, melainkan melalui rekonstruksi kepercayaan masyarakat terhadap negara (Galula, 1964; Petraeus & Amos, 2006).

**Tabel 2. Perbandingan Koops TNI Papua dan Koops Habema**

| Aspek              | Koops TNI Papua                              | Koops Habema                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Pembentukan  | Sebelum 2020 (reformasi bertahap)            | 2024                                                                             |
| Cakupan Wilayah    | Seluruh wilayah Papua (6 provinsi)           | Pegunungan tengah Papua: Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang |
| Fokus Operasi      | Seluruh spektrum OMP dan OMSP di Papua       | Operasi penindakan KKB di medan pegunungan dan operasi teritorial terpadu        |
| Integrasi Matra    | AD + AL + AU (tingkat strategis)             | AD + AU (dominan); AL pendukung                                                  |
| Konsep Doktrin     | <i>Smart power</i> : hard power + soft power | Unified action: kinetik + non-kinetik                                            |
| Kedudukan Hierarki | Di bawah Panglima TNI                        | Di bawah Koops TNI Papua                                                         |

### **Tugas Pokok Koops TNI Papua**

Tugas pokok Koops TNI Papua berlandaskan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi dan kewenangan TNI, utamanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dan kebijakan operasional yang ditetapkan oleh Panglima TNI. Mandat ganda *Operasi Militer Perang (OMP)* dan *Operasi Militer Selain Perang (OMSP)* yang diamanatkan dalam UU TNI merupakan kerangka hukum yang menentukan spektrum penuh tindakan yang dapat dilakukan oleh Koops TNI Papua dalam merespons dinamika keamanan yang terus berubah. Dalam dimensi Operasi Militer Perang (OMP), Koops TNI Papua memiliki mandat untuk melaksanakan operasi penindakan bersenjata terhadap KKB yang mengancam kedaulatan negara, keselamatan warga negara, dan integritas wilayah. Operasi ini mencakup pengejaran, penyergapan, pengepungan, dan pembersihan wilayah dari kelompok bersenjata dengan tetap mematuhi hukum humaniter internasional dan aturan pelibatan yang ditetapkan.<sup>26</sup> Dalam konteks Papua, penerapan OMP secara proporsional menjadi sangat kritis mengingat sensitivitas HAM yang melekat pada setiap operasi militer di wilayah ini.

Dalam dimensi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Koops TNI Papua menjalankan lima fungsi utama yang saling melengkapi: *pertama*, pengamanan perbatasan dengan Papua Nugini sepanjang garis Perjanjian 1983 yang membentang 820 km dari Laut Arafura hingga Samudera Pasifik; *kedua*, operasi intelijen terpadu untuk pemetaan ancaman, identifikasi jaringan KKB, dan deteksi dini eskalasi konflik; *ketiga*, operasi kemanusiaan yang mencakup distribusi

bantuan bahan pangan, pelayanan kesehatan keliling, evakuasi medis darurat, dan penanggulangan bencana; *keempat*, dukungan pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil; dan *kelima*, pembangunan sinergi dengan Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan instansi sipil lainnya dalam kerangka pendekatan keamanan yang komprehensif. Tantangan fundamental yang dihadapi Koops TNI Papua dalam melaksanakan kedua mandat tersebut adalah penyeimbangan yang tepat antara *hard power* dan *soft power* dalam satu kerangka operasional yang koheren. Terlalu dominannya pendekatan kinetik berisiko mengalienasi masyarakat dan memperkuat narasi internasional tentang pelanggaran HAM, sementara terlalu dominannya pendekatan non-kinetik tanpa disertai tekanan operasional yang memadai dapat memberikan ruang gerak yang terlalu luas bagi KKB. Konsep *smart power* yang diadaptasi dari pemikiran Joseph Nye (2011) dan dikontekstualisasikan dalam doktrin operasi TNI menjadi kerangka teoritis yang menjembatani ketegangan antara kedua pendekatan tersebut.

### ***Analisis Faktor Internal (IFAS)***

Faktor internal organisasi direduksi melalui coding wawancara dengan para narasumber untuk menemukan kekuatan operasional dominan serta kelemahan taktis yang menghambat efektivitas Koops TNI Papua. Hasil pembobotan dan rating Matriks IFAS disajikan dalam Tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Faktor Strategis Internal**

| No | Faktor Strategis Internal                                                 | Bobot | Rating | Skor Tertimbang |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|
| 1  | Soliditas struktur komando terintegrasi lintas matra TNI                  | 0,132 | 3,6    | 0,475           |
| 2  | Kapasitas mobilisasi taktis udara satuan pemukul cepat                    | 0,124 | 4,0    | 0,496           |
| 3  | Profesionalisme dan kedisiplinan prajurit dalam operasi teritorial        | 0,118 | 3,5    | 0,413           |
| 4  | Kemampuan pengumpulan intelijen taktis kewilayahan                        | 0,116 | 3,4    | 0,394           |
| 5  | Ketergantungan kritis operasional pada armada angkut udara helikopter     | 0,130 | 1,8    | 0,234           |
| 6  | Hambatan logistik pedalaman akibat faktor cuaca dan medan ekstrem         | 0,112 | 1,7    | 0,190           |
| 7  | Keterbatasan jaringan komunikasi terintegrasi antarpos daerah rawan       | 0,104 | 1,9    | 0,198           |
| 8  | Belum optimalnya sinergi pola operasi bersama instansi Pemda dan Polri    | 0,114 | 1,8    | 0,205           |
| 9  | Kapasitas program Binter kemasyarakatan yang belum merata seluruh distrik | 0,050 | 1,6    | 0,090           |
| 10 | TOTAL FAKTOR INTERNAL                                                     | 1,000 | -      | 2,984           |

Berdasarkan Tabel diatas, total skor tertimbang faktor internal (IFAS) adalah sebesar 2,984. Nilai ini menunjukkan bahwa secara internal Koops TNI Papua memiliki fondasi kekuatan yang kokoh untuk menjalankan tugas pokok pertahanan. Kekuatan utama terletak pada kapasitas mobilisasi udara taktis (nilai tertimbang 0,496) dan soliditas struktur komando lintas matra (nilai tertimbang 0,475) yang dibentuk sejak integrasi taktis Habema. Namun, kelemahan utama berupa ketergantungan helikopter (0,234) dan keterbatasan komunikasi antarpos (0,198) menjadi celah kerentanan utama organisasi.

### ***Analisis Faktor Eksternal (EFAS)***

Analisis faktor eksternal memetakan dinamika lingkungan makro pertahanan yang meliputi peluang strategis dan ancaman nyata di luar kendali langsung organisasi. Hasil pemetaan Matriks EFAS disajikan dalam Tabel 2 berikut:

**Tabel 4. Faktor Strategis Eksternal**

| No | Faktor Strategis Eksternal                                                   | Bobot        | Rating   | Skor Tertimbang |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|
| 1  | Dukungan pemerintah pusat melalui Otsus dan percepatan pembangunan Papua     | 0,138        | 3,8      | 0,524           |
| 2  | Potensi sinergi dengan Polri, Pemda, tokoh adat dan tokoh agama              | 0,132        | 3,6      | 0,475           |
| 3  | Perkembangan teknologi drone, satelit, dan penginderaan jarak jauh           | 0,126        | 3,5      | 0,441           |
| 4  | Keterbukaan masyarakat adat sebagai mitra strategis lapangan                 | 0,116        | 3,4      | 0,394           |
| 5  | Ancaman KKB yang adaptif, sporadis, dengan taktik gerilya dan dukungan lokal | 0,130        | 1,8      | 0,234           |
| 6  | Medan geografis ekstrem dan cuaca tidak menentu yang dieksploitasi KKB       | 0,112        | 1,7      | 0,190           |
| 7  | Penyebaran narasi separatis, disinformasi, dan kerawanan sosial-politik      | 0,104        | 1,9      | 0,198           |
| 8  | Resistensi masyarakat terhadap aparat akibat faktor historis                 | 0,096        | 1,8      | 0,173           |
| 9  | <b>TOTAL FAKTOR EKSTERNAL</b>                                                | <b>1,000</b> | <b>-</b> | <b>2,629</b>    |

Hasil analisis Matriks EFAS dalam Tabel 2 menghasilkan total skor tertimbang sebesar 2,629. Hal ini menunjukkan lingkungan eksternal memberikan peluang responsivitas yang memadai bagi Koops TNI. Peluang tertinggi diperoleh dari dukungan regulasi dan anggaran Otsus pemerintah pusat (nilai tertimbang 0,524) serta potensi integrasi instansi sipil-militer (0,475). Di sisi lain, taktik perang asimetris KKB (0,234) dan resistensi trauma sejarah lokal (0,173) merupakan ancaman eksternal konstan yang membayangi.

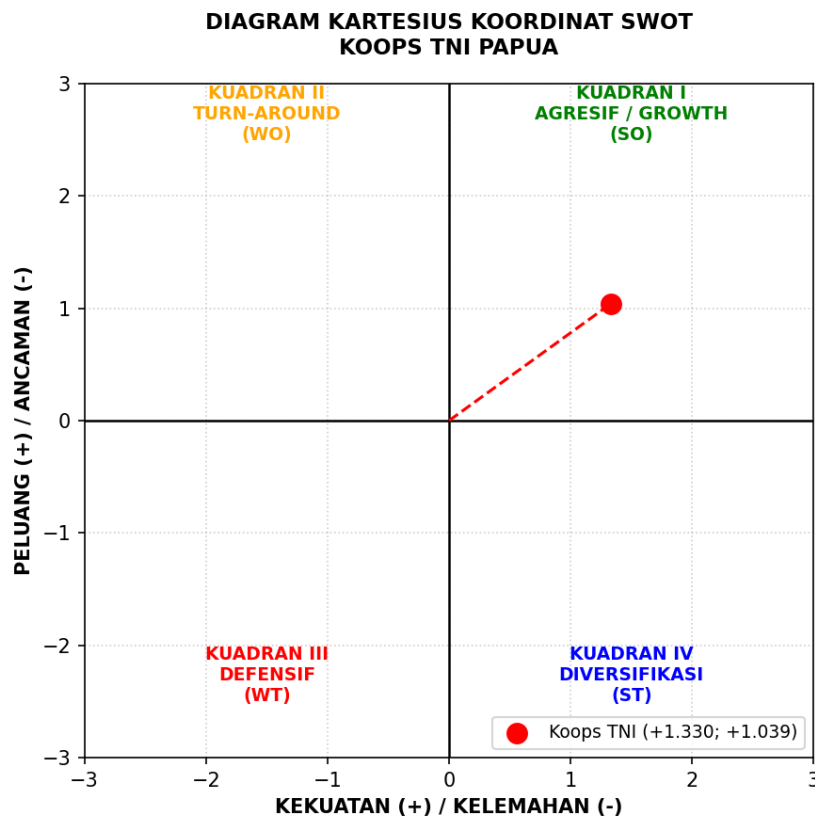
#### **Pemetaan Posisi Strategis (Diagram Kartesius SWOT)**

Untuk menemukan arah strategi operasional komando secara presisi, hasil analisis IFAS dan EFAS diintegrasikan ke dalam sumbu koordinat kuadran kartesius SWOT. Penghitungan koordinat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{Sumbu X (Internal)} = \text{Total Kekuatan (2,157)} - \text{Total Kelemahan (0,827)} = +1,330$$

$$\text{Sumbu Y (Eksternal)} = \text{Total Peluang (1,834)} - \text{Total Ancaman (0,795)} = +1,039$$

Koordinat strategis (+1,330; +1,039) secara definitif menempatkan Koops TNI Papua pada posisi prima di Kuadran I (Agresif / Growth). Posisi kuadran ini mengindikasikan organisasi memiliki kekuatan internal yang besar sekaligus menghadapi peluang eksternal yang sangat luas. Dengan demikian, rekomendasi strategi yang paling efektif adalah melaksanakan Strategi Strengths-Opportunities (SO) secara agresif dan ofensif, yaitu memaksimalkan kekuatan internal militer guna mengeksplorasi peluang strategis di lingkungan luar.



Gambar 1. Diagram Kartesius Hasil Koordinat SWOT Koops TNI Papua

### Perumusan Bauran Strategi Matriks SWOT

Berdasarkan pemetaan koordinat, dirumuskan bauran strategi optimalisasi peran komando terpadu melalui matriks komparasi SWOT komplementer:

Tabel 5. Analisis SWOT

| Matriks SWOT                                                                                                             | STRENGTHS (S)<br>- Komando Gabungan Lintas Matra<br>- Mobilisasi Udara Taktis<br>- Binter & Intelijen Solid                                                                                             | WEAKNESSES (W)<br>- Ketergantungan Helikopter<br>- Blank Spot Komunikasi<br>- Sinergi Sipil-Militer Lemah                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPPORTUNITIES (O)</b><br>- Dana Otsus Pusat<br>- Sinergi Polri/Pemda<br>- Teknologi Drone<br>- Tokoh Adat Terbuka     | STRATEGI SO (Ofensif / Agresif)<br>1. Integrasi drone surveillance dengan satuan pemukul udara (S1, S2, O3).<br>2. Membangun model Binter Desa Mandiri Pertahanan berbasis kearifan lokal (S3, S4, O4). | STRATEGI WO (Turn-around)<br>1. Akselerasi pembangunan pangkalan logistik taktis pedalaman (W2, O1).<br>2. Pembentukan Pusat Komando Koordinasi Tri-Unifikasi real-time (W4, O2).          |
| <b>THREATS (T)</b><br>- Taktik Gerilya KKB<br>- Medan Terjal & Cuaca<br>- Disinformasi Siber<br>- Trauma Sejarah Konflik | STRATEGI ST (Diversifikasi)<br>1. Penggelaran deteksi dini berbasis patok sensor cerdas siber (S4, T1).<br>2. Pembentukan Tim Komunikasi Strategis penangkal propaganda KKB (S3, T3).                   | STRATEGI WT (Defensif)<br>1. Standardisasi Protap operasi berlapis di jalur tidak resmi perbatasan (W4, T1).<br>2. Pelatihan antropologi dan HAM bagi seluruh prajurit penugasan (W5, T4). |

Analisis Pembahasan: Pendekatan *smart power* yang diterapkan oleh Koops Habema terbukti relevan secara empiris. Masyarakat adat menyambut baik kehadiran TNI yang berfokus pada pelayanan kemanusiaan, namun menuntut penghormatan terhadap tanah ulayat adat. Sebagaimana disoroti Tippe (2026), ketegangan historis akibat pendekatan keamanan

militeristik masa lalu hanya dapat disembuhkan melalui pelibatan tulus tokoh adat dalam pembangunan. Temuan SWOT Kuadran I mengarahkan Koops TNI untuk mengintensifkan bauran strategi SO, di mana keunggulan militer taktis digabungkan dengan modernisasi sistem deteksi siber udara guna meminimalkan risiko korban personel di daerah *blank spot* ekstrem.

## Pembahasan

### Dialog Temuan Lapangan dan *Grand Strategy Theory*

Pelaksanaan konsep operasi Koops TNI Papua selaras dengan konsep *Grand Strategy*, yaitu mobilisasi semua sumber daya yang tersedia politik, ekonomi, sosial, dan militer untuk mencapai tujuan nasional jangka panjang yang berkelanjutan. Koops TNI Papua tidak hanya melaksanakan operasi militer kinetik (penindakan KKB), tetapi juga mengintegrasikan dimensi non-militer seperti program kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan kesehatan. Prioritas strategis Koops mencakup tiga aspek utama: operasi penindakan, pengamanan perbatasan, dan operasi kemanusiaan serta dukungan pembangunan. Ketiga prioritas ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan pendekatan *smart power* yang menggabungkan *hard power* dan *soft power*. Pembentukan Koops Habema pada tahun 2024 dan pendekatan *smart power* yang diterapkan merupakan manifestasi nyata dari implementasi *Grand Strategy* di tingkat operasional. Hal ini menunjukkan bahwa TNI tidak memandang operasi di Papua sebagai masalah keamanan semata, tetapi sebagai bagian dari upaya nasional untuk mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas operasi Koops TNI Papua tidak hanya diukur dari keberhasilan militer, tetapi juga dari kontribusinya terhadap tujuan strategis nasional secara keseluruhan. Sebagaimana ditegaskan oleh Mawangi (2024), Koops Habema dibentuk untuk membantu pemerintah dalam "menyatukan pola operasi TNI dan Polri" dan "meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pendekatan keamanan yang humanis dan berbasis kesejahteraan." Namun, penelitian ini juga mengungkap kesenjangan antara kebijakan yang dinyatakan (niat) dan implementasi aktual di lapangan (realitas). Meskipun konsep *Grand Strategy* telah dirumuskan secara baik, implementasinya dihadapkan pada kendala struktural seperti keterbatasan logistik, medan geografis ekstrem, dan koordinasi lintas instansi yang belum optimal. Ketergantungan pada helikopter menjadi kendala serius karena keterbatasan jumlah armada dan kerentanan terhadap cuaca ekstrem, sehingga operasi sering tertunda berjam-jam bahkan berhari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi strategi yang baik tidak cukup tanpa didukung oleh kapabilitas operasional yang memadai.

### Relevansi Teori OMSP dan COIN dalam Operasi Koops TNI Papua

Pelaksanaan operasi Koops TNI Papua menunjukkan relevansi yang kuat dengan teori Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana dijelaskan oleh Lubis (2021). OMSP yang mencakup berbagai kegiatan non-tempur seperti pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan, penegakan hukum, dan dukungan pembangunan menjadi komponen integral dari konsep operasi Koops TNI Papua. Program-program seperti pelayanan kesehatan keliling, distribusi logistik ke daerah terpencil, dan bantuan pendidikan merupakan implementasi nyata dari OMSP di lapangan. Program kesejahteraan yang dilakukan Koops TNI Papua sangat membantu, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau pemerintah daerah, dan program pelayanan kesehatan keliling, distribusi logistik, serta bantuan pendidikan sangat diapresiasi masyarakat. Dalam konteks *Counterinsurgency* (COIN), temuan penelitian ini mengkonfirmasi pentingnya pendekatan tidak langsung yang berfokus pada perolehan loyalitas penduduk melalui "memenangkan hati dan pikiran" (*winning hearts and minds*) sebagaimana ditekankan oleh Galula (1964) dan Petraeus & Amos (2006). Keberhasilan operasi Koops TNI Papua sangat bergantung pada kemampuannya untuk membangun kepercayaan masyarakat, terutama di

daerah-daerah yang memiliki trauma historis terhadap aparat keamanan. Pandangan masyarakat adat terhadap TNI saat ini lebih baik dibanding masa lalu, namun masih ada trauma dari masa lalu yang perlu waktu untuk disembuhkan. Temuan penelitian ini juga mendukung kritik terhadap pendekatan COIN yang terlalu militaristik di Nduga sebagaimana diungkapkan oleh Wangge & Webb-Gannon (2020). Penelitian mereka menunjukkan bahwa kampanye kontra-insurgensi TNI di Nduga menghadapi kegagalan dalam melindungi masyarakat sipil dan membangun kepercayaan dengan komunitas lokal. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Koops TNI Papua telah belajar dari pengalaman tersebut dengan mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan berbasis kesejahteraan, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Pendekatan militer saja tidak cukup tanpa disertai upaya kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan operasi.

### Implikasi Teori Hubungan Sipil-Militer

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi teori hubungan sipil-militer (*civil-military relations*) sebagaimana dibahas oleh Bradford (2024) dan Tippe (2026). Koops TNI Papua beroperasi dalam kerangka pemerintahan sipil dengan tugas membantu Polri dalam mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata dan membantu percepatan pembangunan di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa TNI memainkan peran yang jauh lebih luas daripada sekadar pertahanan eksternal, mencakup misi-misi sipil seperti pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keterlibatan TNI dalam misi sipil ini juga menimbulkan problematika sebagaimana disoroti oleh Tippe (2026) tentang perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pemberdayaan masyarakat Papua. Penelitian Tippe menunjukkan bahwa pendekatan historis pemerintah yang mengabaikan keterlibatan masyarakat lokal menciptakan ketegangan dan menyiratkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif, yakni dengan adanya pelibatan tokoh adat dan penghormatan terhadap struktur sosial lokal. Legitimasi operasi Koops TNI Papua di mata masyarakat sipil sangat bergantung pada seberapa baik ia menavigasi problematika sipil-militer. Jika peran yang dijalankan bahkan jika dimaksudkan untuk kebaikan dianggap sebagai bentuk dominasi militer atau pelanggaran hak-hak masyarakat, maka efektivitas operasi akan terkikis. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan operasi. Tingkat ketidakpercayaan masyarakat masih cukup tinggi di beberapa wilayah, terutama di daerah yang memiliki sejarah konflik panjang, yang dipengaruhi oleh faktor historis, penyebaran disinformasi, dan kurangnya komunikasi yang efektif.

### Elevasi Penerapan *Smart Power*

Koops TNI Papua telah menerapkan konsep *smart power* yang menggabungkan *hard power* dan *soft power* sebagaimana dijelaskan oleh Wiratama & Hendra (2024). Di satu sisi, *hard power* diimplementasikan melalui operasi penindakan terhadap KKB dan pengamanan wilayah perbatasan. Di sisi lain, *soft power* diwujudkan melalui program kesejahteraan, pelayanan kesehatan, dan pendekatan humanis berbasis masyarakat. Koops TNI Papua menerapkan konsep *smart power* melalui dua jalur: operasi militer untuk penindakan KKB dan pengamanan wilayah, serta operasi non-militer berupa bantuan kemanusiaan, distribusi logistik ke daerah terpencil, pelayanan kesehatan, dan dukungan pendidikan. Pendekatan ini bertujuan membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak KKB. Posisi Koops TNI Papua pada Kuadran I matriks SWOT (koordinat +1,330; +1,039) secara teoritis mengharuskan integrasi *hard power* dan *soft power* yang lebih masif daripada sebelumnya. Kuadran I, yang juga dikenal sebagai kuadran strategi agresif atau strategi SO (*Strengths-Opportunities*), mengindikasikan bahwa organisasi berada dalam kondisi yang paling menguntungkan. Dalam konteks Koops TNI Papua, hal ini berarti bahwa struktur komando

gabungan yang solid, pengalaman operasi di medan berat, kapasitas mobilisasi udara, kemampuan intelijen adaptif, dan personel yang terlatih secara sosial-budaya merupakan aset-aset internal yang dapat dimaksimalkan untuk meraih peluang-peluang eksternal yang tersedia. Peluang-peluang tersebut meliputi dukungan kuat pemerintah pusat melalui kebijakan Otonomi Khusus Papua dan program percepatan pembangunan, potensi sinergi dengan Polri, Pemerintah Daerah, tokoh adat, dan tokoh agama, perkembangan teknologi drone dan penginderaan jarak jauh, serta keterbukaan masyarakat adat untuk menjadi mitra strategis di lapangan. Namun, penelitian ini juga mengungkap adanya kesenjangan antara kebijakan yang dinyatakan dan implementasi aktual. Meskipun pendekatan *smart power* telah dicanangkan, penelitian sebelumnya oleh Kontras (2024) mencatat bahwa masih terdapat persoalan terkait pelanggaran HAM dan ketidakpercayaan masyarakat yang terus berlanjut. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa di beberapa wilayah, tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan masih cukup tinggi, terutama di daerah yang memiliki sejarah konflik panjang. Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius bagi implementasi *smart power*. Tanpa mekanisme yang efektif untuk membangun kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas, inisiatif *smart power* yang bermaksud baik pun mungkin gagal mencapai hasil yang diinginkan. Implikasinya adalah bahwa Koops TNI Papua perlu terus meningkatkan konsistensi dalam implementasi pendekatan humanis dan memastikan bahwa setiap operasi militer mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat sipil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan militer saja tidak cukup tanpa disertai upaya kesejahteraan, kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan operasi, dan setiap operasi harus mempertimbangkan aspek budaya lokal dan HAM.

## KESIMPULAN

**Pertama**, Pelaksanaan konsep operasi Koops TNI Papua telah menunjukkan kapasitas yang signifikan dalam mendukung tugas pokok TNI di wilayah Papua. Hasil analisis matriks IFAS menghasilkan total skor sebesar 2,984 yang menempatkan Koops TNI Papua pada posisi internal yang cukup kuat, dengan faktor kekuatan dominan berada pada kapasitas mobilisasi udara (nilai tertimbang 0,496) dan struktur komando gabungan lintas matra yang solid. Kemampuan mengintegrasikan unsur TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dalam satu kerangka operasi gabungan terbukti menjadi tulang punggung pelaksanaan operasi, baik dalam konteks Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pengalaman panjang beroperasi di medan ekstrem Papua menjadikan satuan-satuan di bawah komando Koops TNI Papua lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ancaman yang bersifat asimetris. Kemampuan intelijen tempur yang terus berkembang, didukung oleh personel yang mendapatkan pelatihan khusus pemahaman sosial-budaya lokal Papua sebelum penugasan, menjadikan pendekatan operasi lebih terukur, proporsional, dan humanis. Pendekatan *smart power* yang menggabungkan *hard power* dan *soft power* terbukti relevan dalam konteks operasi di Papua yang memiliki sensitivitas politik, sosial, dan kemanusiaan yang tinggi. Dengan total skor EFAS sebesar 2,629, Koops TNI Papua juga dinilai cukup responsif terhadap lingkungan eksternal. Dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan Otonomi Khusus Papua memperoleh nilai tertimbang tertinggi (0,524), mengindikasikan besarnya potensi sinergi antara operasi militer dan program pembangunan yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara keseluruhan, posisi koordinat SWOT (+1,330; +1,039) menempatkan Koops TNI Papua pada Kuadran I, yang menegaskan bahwa pelaksanaan konsep operasi telah berjalan dalam posisi strategis yang menguntungkan dengan kekuatan dan peluang yang lebih dominan dibandingkan kelemahan dan ancaman.

**Kedua**, Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Konsep Operasi, yang terdiri atas empat faktor kelemahan internal dan empat faktor ancaman eksternal yang secara nyata menghambat efektivitas pelaksanaan konsep operasi Koops TNI Papua. Dari dimensi internal, hambatan utama yang ditemukan adalah: a) ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dukungan helikopter sebagai sarana mobilitas utama, yang menjadikan operasi sangat rentan terhadap gangguan cuaca ekstrem seperti kabut tebal, hujan lebat, dan angin kencang yang kerap terjadi di wilayah pegunungan Papua. Kondisi ini berulang kali menyebabkan keterlambatan operasi bahkan pembatalan misi secara mendadak; b) keterbatasan logistik dan infrastruktur di wilayah terpencil mengakibatkan tingginya biaya distribusi dan lamanya waktu pasokan yang berpengaruh langsung terhadap kesiapan satuan di lapangan; c) koordinasi lintas instansi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam hal pertukaran informasi intelijen dan mekanisme respons cepat di lapangan, menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB); d) jaringan komunikasi yang belum merata dengan banyaknya wilayah *blank spot* menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan komando dan pengendalian, terutama di kabupaten-kabupaten terpencil seperti Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Intan Jaya. Dari dimensi eksternal, ancaman yang paling berat berasal dari pola operasi KKB yang adaptif, sporadis, dan memanfaatkan medan serta jaringan simpatisan lokal (nilai tertimbang ancaman 0,234). Penyebaran narasi separatistis dan disinformasi melalui jejaring internasional turut menciptakan tekanan terhadap legitimasi operasi TNI di mata komunitas global. Selain itu, resistensi sebagian masyarakat terhadap aparat keamanan yang bersumber dari trauma historis masa lalu menjadi tantangan *non-kinetik* yang membutuhkan penanganan jangka panjang dan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Keseluruhan hambatan ini membentuk lingkungan operasional yang kompleks dan multidimensi, yang menuntut adaptasi strategi secara berkelanjutan. Artinya, Pelaksanaan konsep operasi terpadu Koops TNI Papua telah berhasil menggeser paradigma operasional menuju model kesejahteraan humanis (*smart power*), didukung oleh kapasitas mobilisasi taktis udara yang kuat dan komando gabungan lintas matra yang solid (Skor IFAS = 2,984). Hambatan multidimensi utama yang dihadapi meliputi ketergantungan helikopter yang tinggi, kerawanan *blank spot* komunikasi siber, taktik gerilya asimetris KKB yang mengeksploitasi medan ekstrem, serta sisa trauma konflik sejarah masyarakat adat.

**Ketiga**, Strategi Pelaksanaan Konsep Operasi Koops TNI Papua. Berdasarkan posisi Koops TNI Papua pada Kuadran I matriks SWOT dengan koordinat (+1,330; +1,039), strategi yang direkomendasikan adalah strategi agresif (SO) yang memanfaatkan seluruh kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal yang tersedia, serta didukung oleh strategi pendukung WO, ST, dan WT yang bersifat komplementer. Strategi SO (Agresif) menjadi prioritas utama dengan tiga fokus implementasi, yakni: a) mengoptimalkan operasi gabungan lintas matra dengan memanfaatkan dukungan pemerintah pusat dan Otsus Papua untuk memperkuat efektivitas penindakan terhadap KKB dan pengamanan wilayah perbatasan; b) memperkuat operasi teritorial dan komunikasi sosial untuk meningkatkan penerimaan masyarakat melalui sinergi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah; c) memanfaatkan teknologi *drone*, satelit, dan penginderaan jarak jauh untuk meningkatkan efektivitas intelijen tempur dan mobilitas operasi. Strategi WO (*Turn-Around*) diarahkan untuk mengatasi kelemahan internal melalui pemanfaatan peluang eksternal, terutama melalui pembentukan pusat koordinasi terpadu TNI-Polri-Pemda, peningkatan dukungan logistik yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah, serta pengatasan wilayah *blank spot* komunikasi melalui pemanfaatan teknologi satelit dan *drone*. Strategi ST (Diversifikasi/Adaptasi) menggunakan kekuatan yang ada untuk menetralkan ancaman, utamanya melalui penguatan operasi intelijen berbasis

deteksi dini dan peningkatan kemampuan mobilisasi udara untuk menghadapi medan ekstrem dan ancaman KKB yang adaptif. Sementara itu, strategi WT (Defensif) berfokus pada meminimalkan kelemahan agar tidak diperparah oleh ancaman, melalui penguatan komunikasi publik yang humanis, penyediaan infrastruktur komunikasi di daerah blank spot, dan pelaksanaan pelatihan gabungan antarinstansi secara berkala. Artinya, Posisi koordinat SWOT organisasi berada pada Kuadran I (+1,330; +1,039) yang merekomendasikan implementasi Strategi SO secara agresif dan ofensif melalui modernisasi drone surveillance, perumusan Pusat Komando Tri-Unifikasi real-time TNI-Polri-Pemda, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat Papua.

Strategi tersebut bersifat komplementer dan harus diimplementasikan secara sinergis dalam satu kerangka operasional yang terintegrasi. Prioritas utama tetap pada strategi SO sebagai manifestasi dari posisi Kuadran I, namun strategi WO, ST, dan WT harus dijalankan secara paralel untuk memastikan keberlanjutan efektivitas operasi dalam jangka panjang. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan mampu menjawab tantangan multidimensi yang dihadapi Koops TNI Papua dalam mengemban mandatnya sebagai garda terdepan pertahanan dan keamanan negara di wilayah Papua. Maka, berdasarkan kesimpulan diatas, perlu adanya penelitian lanjutan berbasis kuantitatif atau model terapan simulasi mengenai efektivitas pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam pemrosesan data penginderaan udara di kawasan hutan lebat perbatasan Papua guna memperkaya khazanah keilmuan strategi pertahanan darat. Selanjutnya, Pemerintah Pusat perlu mempercepat integrasi dana Otsus dengan program Binter Koops TNI Papua guna membangun pangkalan logistik taktis dan jalan inspeksi perbatasan (JIP), serta mengamankan pembuatan Protap Bersama pengamanan jalur tidak resmi perbatasan darat secara kolaboratif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bradford, J., 2024, The Indonesian Military as a Professional Organization: Criteria and Ramifications for Reform. SSRN Electronic Journal, January 2005. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4653496>.
- Braun, V., & Clarke, V., 2006, Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Clavell, J., 2003, The Art of War Sun Tzu: Seni Perang. Ikon Teralitera.
- Hollweck, T. (2016). Robert K. Yin. (2014). *Case Study Research Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 pages. *The Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1), 282. <https://doi.org/10.3138/CJPE.BR-240>
- Lubis, A. F., 2021, Mengantisipasi Dampak Yuridis dan Non Yuridis Pelibatan TNI dalam Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i4.21685>.
- Pauker, G. J., 1963, *The Indonesian Doctrine of Territorial Warfare and Territorial Management*, California: United States Air Force Project Band.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafrudin Tippe, 2026, *Relasi Sipil-Militer dalam Pemberdayaan Masyarakat Papua* (Tesis Magister), Bogor: Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dan kebijakan operasional yang ditetapkan oleh Panglima TNI.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

- Wangge, H. R., & Webb-Gannon, C., 2020, Civilian Resistance and The Failure of The Indonesian Counterinsurgency Campaign in Nduga, West Papua, Contemporary Southeast Asia, 42(2), 276-301. <https://doi.org/10.1355/cs42-2f>.
- Warfare, C., 2006, Galula on Adapting to Insurgency Environments. Juli.
- Wiratama, T., & Hendra, A., 2024, Strategi Smart Power dalam Menghadapi Ancaman Gerakan Organisasi Papua Merdeka Guna Mendukung Keamanan Nasional. Jurnal Strategi dan Keamanan Nasional, 7(2), 688-706. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2369>.
- Wiratama, T., & Hendra, A., 2024, Strategi Smart power dalam Menghadapi Ancaman.
- Wiratama, Teguh. Hendra, Afrizal. Andries, 2024, Gerakan Organisasi Papua Merdeka Guna Mendukung Keamanan Nasional Smart Power Strategy in Facing the Threat of the Free Papua Movement to Support National Security, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 7(2), 688–706. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2369>